PERANAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Lilik Suherman
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH
Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Alamat: Jl. Mahoni No.4 Harapan Raya

ABSTRACT

Social services and the funeral the city of Pekanbaru in order to execute the work through the field of rehabilitation, social do the various efforts to top donor problem of social welfare inthe city pekanbaru, however the efforts that have been done that face varoety of obstacle that can be overcome and the effort to do can be run in optimum. This research was given the title role of social services and the funeral the city of pekanbaru. This problem research is whether factors being the cause of the top donor problem of social welfare in the city Pekanbaru, are factors to be obstacles of social services and the funeral the city of Pekanbaru, how did attempt to do social services and the funural the city of Pekanbaru overcome obstacles and social rehabilitation in the city Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of juridical sociological research directly on the location or place under study with the source of data primary and secondary, the technique of gathering data from interviews and literature study with analisis and deskriptif kualitatif and method of with drawal conclusions to be made deduktif.

The result of the research show factor is poverty,stranded, tuna social, remote, the left, unemployment, human resouces, value individualistik and philosophical value of culture started eroded, culture society konsumtif, obtaclesis an appropriate field of social rehabilitation is limited, human resources less adequate, budget not adequate, the rehabilitation of social a little bit and role as well as the public yet optimum the effort in to overcome obstacles is increased efetifitas kinerja, knowledge and experience of the work, the addition of employees, the field of social rehabilitation, improve the quality of the commencement pembinaan and training effectively, the development of the social bina work, visits to others.

Keyword : Role- Social Services and Funeral- Rehabilitation Social

A. Pendahuluan

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan merupakan persekutuan manusia yang memiliki kemampuan atau wewenang untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga pandangan yang demikian disebut sebagai negara kesejahteraan atau *wellfare state.*

Selanjutnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara secara jelas dan tegas dinyatakan dalam alinea 4 (empat) yaitu kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kegiatan rehabilitasi sosial yang dimaksud merupakan salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan salah satu tugas pokok kementerian sosial.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Ditjen Yanrehsos) yang kedudukan,tugas, dan fungsinya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu menyelenggarakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial. Direktorat jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan.

Seperti permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, Kota Pekanbaru juga mempunyai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan meskipun telah ada ketentuan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa ketertiban sosial adalah keadaan ketenteraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tenteram.

Hal ini dapat diketahui dari keberadaan gelandangan dan pengemis selalu saja menjadi masalah yang tak terselesaikan di Ibu Kota

Provinsi Riau, Pekanbaru. Berulang gelar razia dilakukan dan selalu didapati kalangan yang rata-rata tuna wisma itu. Terakhir, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Provinsi Riau bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial setempat berhasil menjaring sejumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di daerah itu."Hasil dari razia tadi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, ada enam orang gelandangan dan pengemis yang kami amankan," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Ely Farsyah kepada wartawan Di Pekanbaru, Kamis (24/10/2013).[1]

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru yang masih tinggi, faktor penyebab penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi faktor penghambat sehingga penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul**:"Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial di Kota Pekanbaru"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengatasi faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengatasi faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis tentang rehabilitasi sosial dan korelasinya dengan instansi terkait.

[1] http://www.goriau.com/berita/pekanbaru/lagi-lagi-gelandangan-dan-pengemis-jadi-masalah-pekanbaru.html diakses, tanggal, 22 Februari 2014.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi khazanah literatur khususnya hukum tata negara bagi kalangan akademis Universitas Riau.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[2]Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari Undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.[3]

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.[4]

2. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) berkembang di negara-negara Eropa bahkan meluas hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep legal state atau negara penjaga malam.[5] Ciri utama walfare state adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga warganya.[6]

Sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman,

[2] Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21 dan Maurice Cranston, *What are Human Rights?* New *York, Taplinger*, 1973, dalam Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM-UII, 2008, hlm. 11.

[3]Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 2.

[4] Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 15-16.

[5] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 14.

[6] *Ibid,* hlm. 15

sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[7] Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

D. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah melihat, menjenguk, periksa, teliti;[8]
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melakasanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya);[9]
3. Peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa;[10]
4. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;[11]
5. Rehabilitasi Sosial adalah: proses refungsionalisasidan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;[12]
6. Pekanbaru adalah: ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia;[13]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis sosiologis*

[7] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung , 1983, hlm. 24.

[8] Daryanto, S.S, Kamus bahasa Indonesia lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 611.

[9] Ibid, hlm. 384.

[10] Ibid, hlm. 487.

[11] http://www.pekanbaru.go.id/departemen-dan-lembaga/ diakses, tanggal, 5 Maret 2014.

[12] Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru , diakses, tanggal, 5 Maret 2014.

yang dilakukan dengan cara *survey* langsung dilokasi penelitian yaitu kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan penduduk PMKS di kota Pekanbaru. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara terhadap populasi yang sebelumnya telah ditentukan.

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang pelaksanaan peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk memudahkan penulis memperoleh data penelitian yang dibutuhkan maka lokasi dalam penelitian ini laksanakan Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan penduduk PMKS di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sempel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.[14]

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan obyek penelitian,[15] dan untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian.

Metode penetapan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti, agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka dalam proses penelitian ini menggunakan metode Sensus yaitu mengambil semua populasi yang ada untuk diteliti . metode selanjutnya adalah *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.[16] yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil *observasi* di lapangan (*field research*),

[14] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 42.

[15] Sunarmi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 15.

[16] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

terhadap pelaksanaan peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yaitu buku-buku, *literatur*, makalah, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru.

c) Data Tertier

Data tertier adalah data yang penulis peroleh melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

A. Wawancara *nonstruktur* yang diartikan dengan metode wawancara dimana si pewancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan, sehingga mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti;
B. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode deduktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Pekanbaru.

Menurut Mutia Eliza secara umum faktor penyebab Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru adalah:[17]

1) Kemiskinan yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial;

[17] Wawancara dengan Ibu Mutia Eliza, Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tanggal 20 November 2014.

2) Pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial;

3) Ketunaan Sosial yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM;

4) Keterpencilan dan Ketertinggalan

Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan, dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Eli Farsya yang menyatakan bahwa munculnya penyandangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru karena pesatnya perkembangan pembangunan Kota Pekanbaru dewasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk kabupaten lain di Propinsi Riau dan propinsi lain untuk migrasi ke Kota Pekanbaru untuk bekerja di Kota Pekanbaru. Banyaknya pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan peluang kerja akan menimbulkan persaingan yang ketat diantara sesamanya sehingga bagi mereka yang tidak mampu bersaing menjadi pengangguran dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mau bekerja apa saja, termasuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti mencuri, menipu, merampok, menjadi pengedar narkoba, menjadi gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila dan lain sebagainya.[18]

Dalam mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga di Kota Pekanbaru saat ini semakin sulit, kami tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja lain karena keterbatasan pendidikan dan keahlian kami apalagi lowongan kerja sedikit sedangkan pencari kerja semakin banyak. Kesempatan kerja yang ada biasanya membutuhkan persyaratan dan keahlian tertentu yang tidak kami

[18] wawancara dengan Ibu Eli Farsya, Kepala Bidang Rehabilitasi Social Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tanggal 21 November 2014

miliki sehingga kami terpaksa bekerja apa saja termasuk menjadi gelandangan dan pengemis, yang penting mendapatkan uang dan hasilnya bisa untuk makan sekeluarga.[19]

Selama menjadi pengemis di Kota Pekanbaru, penghasilan yang saya dapatkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya saya kirim ke kampung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di kampung. Saya mengemis di Kota Pekanbaru selalu berpindah-pindah, kadang di pusat perbelanjaan, kadang langsung mendatangi ke tempat-tempat usaha dan rumah makan, karena tempat tersebut yang banyak yang mengasih uang. Waktu kerja saya bisa satu hari penuh, bisa setengah hari, bisa mulai pagi hari, bisa siang hari sampai malam hari, semua tergantung hasil yang saya dapat, apabila hasilnya sedikit maka waktu kerja saya bisa seharian penuh, namun apabila hasil yang saya dapat lumayan banyak maka biasanya setengah hari saja. Sebenarnya saya malu melakukan pekerjaan ini karena dianggap hina oleh masyarakat namun saya tidak mempunyai pekerjaan dikampung maupun pilihan lain sehingga hal ini terpaksa saya lakukan, apalagi hasilnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pekerjaan mengemis ini terus saya jalani.[20]

B. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Di Kota Pekanbaru.

Terkait hal tersebut Mutia Eliza mengemukakan bahwa fungsi rehabilitasi sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan upaya melaksanakan bimbingan, pembinaan dengan kegiatan pelatihan keterampilan dan melakukan razia untuk menekan atau mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi berdasarkan pengalaman implementasi dilapangan dijumpai adanya beberapa faktor penghambat sebagai berikut:[21]

1) Jumlah pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bidang rehabilitasi sosial terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2013 sebanyak 46.188 orang. Kondisi keterbatasan tersebut berpengaruh pada kinerja pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bidang rehabilitasi sosial yang merasa kesulitan dalam menanganinya;

[19] Hasil wawancara dengan Responden, Gelandangan dan Pengemis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru, Tanggal 23 November 2014.

[20] Hasil wawancara dengan Responden, Gelandangan dan Pengemis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru, Tanggal 23 November 2014.

[21] Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Eliza, Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tanggal 20 November 2014.

2) Beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bidang rehabilitasi sosial kurang kompeten, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;

3) Sumber dana anggaran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berasal dari APBD pemerintah Kota Pekanbaru belum memadai sehingga penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kurang maksimal;

4) Panti rehabilitasi sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru hanya Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Kecamatan Rumbai sehingga kurang mendukung dalam pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak berkelanjutan dan sistematis;

5) Kesadaran masyarakat terhadap dampak penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi lingkungan masyarakat masih kurang sehingga partisipasi masyarakat juga kurang.

Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru juga dikemukakan oleh Eli Farsya yang menyatakan bahwa faktor penghambat Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rangka melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial adalah kompetensi pegawai bidang rehabitasi sosial kurang memadai dan jumlah personil yang mengurusi bidang rehabilitasi sosial kurang karena jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru yang tinggi, sarana penunjang kegiatan seperti panti rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya satu panti rehabilitasi, minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru, kurangnya sosialisasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru maupun instansi terkait sehingga peran serta masyarakat masih kurang.[22]

C. Upaya Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Rehabilitasi Sosial Di Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dituntut harus mengetahui kondisi internal maupun eksternal. Mengingat kompleknya hambatan yang timbul

[22] Hasil wawancara dengan Ibu Eli Farsya, Kepala Bidang Rehabilitasi Social Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tanggal 21 November 2014.

dalam upaya menekan atau mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru maka Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui bidang rehabilitasi sosial berusaha melakukan berbagai cara untuk mengatasinya sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Seperti yang dikemukakan oleh Mutia Eliza bahwa dalam mengatasi faktor penghambat yang timbul karena adanya keterbatasan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, maka Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya antara lain:[23]

1) Meningkatkan efektifitas kinerja seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru,
2) Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman satuan kerja dilingkungan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan mengikutsertakan dalam pendidikan formal dan non formal sehingga diharapkan mampu mengatasi pemasalahan yang timbul dalam pelaksanaan teknis dilapangan;
3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelatihan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru secara efektif, terus menerus, sistematis dan terpadu;
4) Merencanakan pembangunan Panti Sosial Bina Karya di Kota Pekanbaru dan rencana tersebut telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan. Manfaatnya adalah untuk menampung jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru yang semakin banyak sementara panti rehabilitasi sosial yang telah ada daya tampungnya tiduk mencukupi;
5) Mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain yang telah berhasil dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kompetensi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru;
6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yaitu kepolisian, satuan polisi pamong praja, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, dinas tenaga kerja, dinas transmigrasi, kependudukan dan lain-lain, dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru,
7) Bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru untuk mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sponsor kegiatan yang ditaja oleh Dinas Sosial Dan

[23] Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Eliza, Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tanggal 20 November 2014.

Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pelatihan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru dan memberikan kesempatan bekerja atau memberikan bantuan modal untuk wirausaha kepada peserta binaan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

8) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru dengan melakukan pendekatan dan himbauan melalui media massa, media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat , pemuka masyarakat, generasi muda, lembaga swadaya masyarakat melalui program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru adalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterpencilan dan ketertinggalan, pengangguran, sumber daya manusia, nilai-nilai individualistik dan filosofis nilai budaya mulai terkikis sehingga masyarakat menjadi konsumtif.
2. Faktor penghambat Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru adalah pegawai bidang rehabilitasi sosial terbatas, sumber daya manusia kurang kompeten, anggaran belum memadai, panti rehabilitasi sosial sangat sedikit dan peran serta masyarakat belum optimal.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat yang timbul adalah meningkatkan efektifitas kinerja, pengetahuan dan pengalaman satuan kerja, penambahan jumlah pegawai bidang rehabilitasi sosial, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelatihan secara efektif, pembangunan Panti Sosial Bina Karya, kunjungan kerja ke daerah lain, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, mengarahkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sponsor kegiatan, memberdayakan peran serta masyarakat dengan melalui program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

B. SARAN

1. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru diharapkan melakukan pengawasan terhadap peserta yang telah mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bimbingan berkelanjutan bagi peserta yang membuka usaha serta memberikan penghargaan kepada peserta yang telah berhasil berwira usaha.
2. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru diharapkan mengefektifkan penggunaan

anggaran yang ada dan bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah anggaran guna pembangunan panti sosial yang baru.

3. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru diharapkan dapat menggali dan meningkatkan potensi sumber daya masyarakat, instansi terkait dan perusahaan yang berkedudukan di Kota Pekanbaru untuk berperan serta dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Pekanbaru.

G. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994.

Donnely, Jack, 2008, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London 2003, dan Maurice Cranston, *What are Human Rights?* New *York, Taplinger*, 1973,(Terjemahan Rhona K. M. Smith), *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM-UII, 2008.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo, Jakarta.

Hanitijo, Soemitro, Ronny, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Lubis, Todung, Mulya, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunarmi, *2012, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Supranto. J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus

Daryanto S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, EYD Dan Pengetahuan Umum*, Apollo, Surabaya.

Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi Ham,* Makalah Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM,

Yogyakarta, 12-13 Maret 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12.

D. Website

http://www.goriau.com/berita/pekanbaru/lagi-lagi-gelandangan-dan-pengemis-jadi-masalah-pekanbaru.html diakses, tanggal, 22 Februari 2014.

http://www.pekanbaru.go.id/dinsos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=23 diakses, tanggal,22 Februari 2014.

http://klikriau.com/read-13326-2014-06-10--sempena-hut-pekanbaru-dinsos-latih-545-penyandang-pmks.html, Diakses tanggal,22 Februari 20014.